

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Disertasi, Tesis, dan Skripsi

- Ernawati, M. Shohib. 2024. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Selatan: Damera Perss.
- Fauzan, Moch. Alfin. 2025. *Problematisasi Pelanggaran Etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 11-12.
- Khoirunisa, Rahmadhani. 2024. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam*. Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 12.
- Mukhammad, Bahir. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Bangutapan Bantul, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Mustofa, Syahrul. 2020. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Bogor, Jawa Barat: Guepedia.
- Myaskur. 2023. *Politik Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi*. Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 15.
- Program, Indonesia Judicial Reform. 2023. *Laporan Kajian Sistem Dokumentasi Elektronik di Lembaga Peradilan*. Jakarta: Kemenkumham.
- Satrio, H. 2022. *Reforma Prosedur Peradilan Konstitusi*. Jakarta: Peranmedia.
- Wahyu, H. Ramadani. 2022. *Putusan Pengadilan*. Cileunyi, Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Wahyu, R. (2022). Delimitasi Solusi Kebijakan Yudisial. *Jurnal Hukum Pembaruan*, 11.
- Wahyu, Ramadani. 2023. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.

Jurnal

- Affan Akbar, Muhammad Yangyang, dkk. 2023. "Perkembangan Demokrasi di Indonesia." *Advance in Social Humanitues Research* 1 (5).
- Ahmad, Fandi. 2014. "Poitik Hukum Perubahan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 1 (2).
- Ahmad, Fandi. 2014. "Politik Hukum Perubahan Undang - Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 1 (2).
- Andhani, Hani. 2021. "Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital : Upaya Menegakkan Konstitusi Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2.
- Andika Kelvin, Bambang Fitrianto, dkk. 2025. "Immplementasi Asas Fair Trial dan Open Justice dalam Lega Memorandum dan Eksaminasi sebagai Sarana Pengawasan Akuntabiitas Hakim." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosia, Poitik dan Humaniora* 4 (1).
- Arifin, Bustanul. 2020. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Pulitik di Indonesia." *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23 (1).
- Arman Rohmatilah, M. Sa'diyin, dkk. 2023. "Tantangan dan Prospek : Implementasi Prinsip - Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara." *Jurnal of Sharia* 2 (2).
- Auliadi, M. I. A., Pradana, O. F. R., Intansari, L., & Arifin, S. 2024. "Konsekuensi Pelanggaran

- Kode Etik Hakim MK terhadap berlakunya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 4.
- Aurelya Putri, Kayus Kayowuan. 2025. "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Konstitusi dalam Perspektif Etika Profesi Hukum (Studi Kasus Hakim Konstitusi Anwar Usman)." *Amandemen : Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2 (3).
- Ayuk Hardani, Lita, dkk. 2019. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2).
- Azkia, Ashfa. 2021. "Penerapan reflexive Law dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi di Lingkungna Penadian." *Lex Renaisan* 6 (2).
- Bambang, Benny. 200754. "Perkembangan Denokrasi di Negara Indonesia." *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 5 (1).
- Böckenförde, M. 2021. "Comparative Analysis of Judicia Transparency Models." *International Jurnal of Constitutional Law* 19.
- Bolang, Jean. 2014. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Lex et Societatis* 2 (9).
- Bong Bong. 2024. "Peran Partisipasi Publik dalam Pemungutan Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal of Administration and International Development* 4 (2).
- Budiarti, H. (2025). Rekayasa Konstitusional Atas Politik Hukum Pemilu di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. *JIL: Jurnal of Indonesian Law*, 6(1), 45 - 60.
- Cahya, Kadek. 2019. "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya

- Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik." *Administrative Law & Governance Jurnal* 2 (2).
- Dhea Nanda, Pipi Susanti. 2025. "Impikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Integritas Konstitusional." *Jurnal Hukum Progresif* 8 (5).
- Diah Ayu, Achmad Arbi, dkk. 2024. "Efektivitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Reformasi Hukum* 28 (1).
- Diantika Chayani, Arif Wibowo. 2023. "Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi Melalui Ketatanegaraan di Indonesia." *JUSTICES : Jurnal of Law* 2 (3).
- DJ, Yuzrizal. 2018. "Negara Hukum yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang - Umdang Daras 1945)." *Jurnal Menara Ilmu* 12 (79).
- Fadjar Trisakti, Adnin, dkk. 2021. "Transparansi dalam Kepentingan Umum." *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* 19 (36).
- Fahira, Yumma. 2025. "Sistem Checks and Balances dalam Menjaga Prinsip Demokrasi." *Jurnal Media Akademik* 3 (6).
- Fai'q, A. . (2024). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Etika Politik Islam. *Jurnal Sosial dan Konsultasi*, 2(1), 12 - 25.
- Fajar Trisakti, Andin Dikeu, dkk. 2021. "Transparansi dan Kepentingan Umum." *Jurnal DIALEKITA : Jurnal Ilmu Sosial* 19 (1).
- Fauzan, M. A. (2025). *Problematisa Pelanggaran Etik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Fazal Akmal, Gina Sabrina. 2023. "Pembatasan Keterbukaan Informasi Publik Terhadap putusan Pengadilan." *Jurnal Yudisial* 1 (3).

- Febrianingsih, Nunuk. 2012. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintah Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Rechts Vinding* 1 (1).
- Febriyansyah. (2025). Permasalahan Etika Profesi Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023: Refeksi atas Penguasaan yang Meruntuhkan Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1)
- Fernanda, J. R. (2024).). The Effectiveness of Constitutional Supervision Judges by the Constitutional Court Honorary Council. *Jurnal Reformasi Hukum*, 28(1)
- Fiqih, W. d. (2023). Analisis penerapan rule of law oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution (Studi kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE : Indonesian Jurnal of Social Studies and Education*, 1(3)
- Habermas, J. 1996. *Between facts and norms: Contributiooons to a Discourse of Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
- Hardianto, H., Sakti, S .W. K., & Meliza. 2024. "Masalah Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden : Studi Open Legal Policy dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Supermasi* 14.
- Hasanuddin, Ikhwanul, dkk. 2024. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Sebagai Landmark Decision." *Landmark Decision TRIOGI : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta* 4 (1).
- Hidayat, Ma'ruf. 2014. "Imam Al - Ghazali dan Konsep Masalahah : Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Isam." *Jurnal Studi Keislaman* 5 (1).
- Khilmi. (2024). Judicia Review and Civil Society oversight : Synergy in Realizing a Democratic

- Constitutional Court (Study of Constituiona Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023).
Jurnal LEGAL BRIEF, 14(1)
- Kurniawan, Y. L., Piyantoni, C. F., & Permana, R. A. 2023. "Analisis Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Argumen Open Legal Policy dan Etika Hakim MK." *Gudang Jurnal Multidisiplin*.
- Kuswan Hadji, Aisyah Azzahra, dkk. 2025. "Implementasi Good Governance dalam Perspektif embaga Negara Mahkamah Konstitusi." *Judge : Jurnal Hukum* 6 (1).
- Liba. (2024). Praktek di Pengadilan Berbasis Elektronik: Bentuk Konkret Transparansi dan Akuntabilitas. *Juris: Jurna Kajian Hukum*, 4(2).
- Lilam, Tanto. 2023. "Perbandingan Desain Pengujian Konstitusional pada Mahkamah Konstitusi Faderal Jerman dan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 16 (2).
- M. Faiz, Harisman. 2024. "Kemandirian dan Transparansi Hakim dalam Mengadili Perkara di Indonesia dan Thailand : Anisi Perbandingan Praktik Peradilan." *Jurnal Ilmiah Peneitian : Law Jurnal* 5 (1).
- Mangara Maidlando, Natasya Aprilia, dkk. 2024. "Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabukan aporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal de Jure* 16 (1).
- Marwan, Ali. 2019. "Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (2).
- Moza, Andhiya. 2023. "Good Gvernance dalam Menciptakan Masyarakat Taat Hukum." *Jurnal Kelola : Jurnal Ilmu Sosial* 2 (2).
- Muhammad Addi, Fandi Nur. 2019. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi dalam

- Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Poicy)." *Justitia et Pax Jurnal Hukum* 35 (2).
- Noer Bunka, M. Baharudin. 2025. "Peran Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik : Perspektif Teoritis." *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5 (1).
- Nurdiansyah, Edwin. 2016. "Keterbukaan Infoemasi Pubik sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat." *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 3 (2).
- Nurhidayat, Ipan. 2023. "Prinsip - Prinsip Good Governance di Indonesia." *Jurna E - Gov Wiyata* 1 (1).
- Nurhikma Ganti, Emilia Susanti, dkk. 2024. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2 (3).
- Oktarini Kamilah, Hasrul Aawar, Astri Natasi. n.d. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri 1 Tanjung." *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik* 10 (1).
- Pratama, Samdi. 2023. "Perspektif Hukum dalam Keterbukaan, Transparansi, Proposional, dan Penegakan Hukum pada Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Perspektif Hukum* 23 (2).
- Purnomo, Antonius Dewanto. 2024. "Peran Penegak Hukum, Etika Profesi, dan Transparansi dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Yudisial." *Mandalika Law Jurnal* 2.
- Radjab, Syamsyuddin. 2013. "Negara Hukum Demokratis : Konstitusionalisme, Rule of Law, dan HAM." *Sulsena* 8 (2).
- Rajis, Namira Diffany, dkk. 2024. "Netralitas Kehormatan Hakim Konstitusi dalam Menegakkan Kode Etik Hakim : Kajian Perbandingan dengan Komisis Yudisial." *Jurnal Hukum Lex*

Generalis 19 (1).

Ribika Yonathan, Yogo Pamungkas. 2024. "Perubahan Frasa Putusan Oeh Hakim Mahkamah Konstitusi saat Sidang Pengucapan Putusan." *Amicus Curiae Jurnal* 1 (4).

Ribika Yonathan, Yogo Pamungkas. 2024. "Perubahan Frasa Putusan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi saat Sidang Pengucapan Putusan." *Amicus Curiae Jurnal* 1 (4).

Sari, A. 2021. "Transparansi dalam Proses Pengambilan Keputusan di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum dan Keadian* 12.

Setiawan, R. 2020. "Dampak Keterbukaan Informasi Publik terhadap Kepercayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8.

Shadrina, G. N., Saebani, B. A., & Alamsyah, T. 2025. "Dissenting Opinion Hakim dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Uji Materil Pasal 169 huruf Q Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5.

Simanungkalit. (2024). Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi dan Transparansi Peradilan di Indonesia. *Pakuan Law Reveiw*, 10(1).

Sisma Yanti, Roky. 2025. "Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Pers dalam Mendorong Pemerintah yang Transparan." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2).

Soerang. (2025). Strategi Pengadilan Agama dalam Mengoptimalkan Pelayanan Berbasis Efisiensi dan Kemaslahatan. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga & Peradilan*, 6(1).

Suhartini. 2019. "Demokrasi dan Negara Hukum (Dalam Konteks Demokrasi dan Negara Hukum Indonesia)." *Jurnal de Jure* 11 (1).

Syarif, K. A. 2023. "Juridical Reveiw of Dissenting Opinion of Decision No. 90/PUU-XXI/2023 Relate to The Argument of Open Legal Policy and The Code Rthics of MK Judge." *Pinisi*

Jurbal of Social Since 3.

Tanto Lailam, M. Lutfi. 2023. "A Proposal to Adopt Concrete Judicial Reveiw in Indonesian Constitutional Court : A Study on The German Federal Constiutiional Court Experience." *PJIH* 1 (1).

Wahyu, R. 2022. "Delimitasi Solusi Kebijakan Yudisial." *Jurnal Hukum Pembaruan* 11.

Whyu Koswaran, dkk. 2023. "Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dihubungkan dengan Undang - uNDANG No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Unes* 6.

Yahya Luthfi, Cleo Farrel, dkk. n.d. "Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terkait Argumen Open Lega Polucy dan Etika Hakim MK." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1 (6).

Zahran, A., M, Putratama, F., Pamungkas, R. A.,& Nurgiansah, H. 2025. "Demokrasi dan Keterbukaan Informasi : Pentingnya Transparansi dalam Sistem Demokrasi." *Jurnal of Constitutional, Law and Human Rights* 1.

Peraturan Perundang – Undangan

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Repubik. 2023. *Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang - Undang*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. 2020. *Pedoman Rapat Permusyawaratan Hakim*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Republik Negara. 2008. *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi. 2018. *Hukum Acara Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendra dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Negara Republik Indonesia. 1945. "Undang - Undang Dasar 1945." Pasal 28F.

Negara Republik Indonesia. 2025. "Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang - Undang." *Mahkamah Konstitusi*. Indonesia: NKRI.

Negara Republik Indonesia. *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.

Negara Republik Indonesia. 2003. "Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi." Jakarta.

Negara Republik Indonesia. "Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman."

Sekretariat Jendra dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. *Hukum Acara Konstitusi*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta.

Sekretariat Jendra dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum Acara Konstitusi*. Jakarta: Negara Republik Indonesia.

Website

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2009. "Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan MK." *bphn.go.id*. Accessed 1 25, 2026. https://bphn.go.id/data/documents/pkj_mk.pdf
.Affan Akbar, M. Y. (2023). Perkembangan Demokrasi di Indonesia. *Advance in Social*

Humanities Research, 1(5), 627.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2009). *Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Putusan*

MK. Dipetik 1 25, 2026, dari bphn.go.id: https://bphn.go.id/data/documents/pkj_mk.pdf

Dandapala. (2025). *Urgensi Penggunaan Ikhtisar Musyawarah Sebelum Menjatuhkan Putusan*.

Dipetik 1 25, 2026, dari <https://dandapala.com/article/detail/urgensi-penggunaan-ikhtisar-musyawarah-sebelum-menjatuhkan-putusan>

Hukum Online. (2023). *Bocornya Rahasia RPH, 9 Hakim Konstitusi Melanggar Prinsip*

Kepantasan dan Kesopanan. Dipetik 1 20, 2026, dari

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bocor-rahasia-rph--9-hakim-konstitusi-melanggar-prinsip-kepantasan-dan-kesopanan-lt654b3140794c2/>

Kepaniteraan Mahkamah Agung . (2023). *Meihat Sisi Transparansi Peradilan yang Diapresiasi*

oleh Presiden Jokowi dalam Podato Kenegaraan . Dipetik 1 25, 2026, dari

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2245-melihat-sisi-transparansi-peradilan-yang-diapresiasi-oleh-presiden-jokowi-dalam-pidato-kenegaraannya>

Mahjudi, H. (t.thn.). *Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim*. Dipetik September 30, 2025, dari

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama :

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228>.

Mahkamah Agung. (2025). *Keadilan yang Bergema : Paradigma Transparansi Akuntabilitas dan*

Strategi Komunikasi Publikasi Peradilan di Era Digital. Dipetik 1 10, 2026, dari

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-yang-bergema-paradigma-transparansi-akuntabilitas-0Az>